

DAYA SAING KEDELAI DI KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP

PURWATI RATNA W, RIBUT SANTOSA, DIDIK WAHYUDI

Fakultas Pertanian, Universitas Wiraraja Sumenep

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis keuntungan kedelai untuk lahan semi teknis, (2) menganalisis daya saing baik dari sudut pandang keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, (3) mengkaji dampak kebijakan pemerintah dalam usahatani kedelai, dan (4) mengetahui daya saing kedelai berkaitan dengan perubahan harga faktor-faktor produksi. Metode analisis yang digunakan adalah alat analisis matrik kebijakan *Policy Analysis Matrix* (PAM). Hasil analisis menunjukkan bahwa usahatani kedelai yang ditanam di lahan semi teknis secara privat menguntungkan sebesar Rp. 5.139.011 per ha. Secara sosial nilai profitabilitas untuk lahan semi teknis memiliki efisiensi usahatani dengan keuntungan Rp. 1.337.776 per ha. Usahatani kedelai di lahan semi teknis memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dengan nilai DRC sebesar 0,8058, serta nilai PCR sebesar 0,5622. Perubahan kebijakan pemerintah jika terjadi kenaikan harga *input tradable* sebesar 10% dan 30% mengakibatkan penurunan keunggulan kompetitif. Kebijakan pemerintah jika terjadi kenaikan harga pupuk urea sebesar 40% mengakibatkan penurunan keunggulan kompetitif. Kenaikan pajak impor kedelai sebesar 20 % mengakibatkan penurunan keunggulan komparatif.

Kata Kunci: Daya Saing, Kedelai

I. PENDAHULUAN

Komoditas kedelai mempunyai beberapa peranan strategis yaitu: (1) sumber bahan makanan bergizi bagi masyarakat yang kaya akan vitamin dan mineral; (2) sumber pendapatan dan kesempatan kerja, serta kesempatan berusaha; (3) bahan baku agroindustri; (4) sebagai komoditas ekspor yang merupakan sumber devisa negara dan (5) pasar bagi sektor non pertanian, khususnya industri hulu.

Alamat Korespondensi:

Purwati Ratna W, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Wiraraja Sumenep. Jl. Raya Sumenep-Pamekasan Km.5 Patian-Sumenep

Ribut Santosa, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Wiraraja Sumenep. Jl. Raya Sumenep-Pamekasan Km.5 Patian-Sumenep

Didik Wahyudi, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Wiraraja Sumenep. Jl. Raya Sumenep-Pamekasan Km.5 Patian-Sumenep

Komoditas kedelai sangat strategis sehingga perlu memperoleh prioritas pengembangan. Hal ini ditandai dari sisi permintaan baik berupa konsumsi segar maupun olahan yang meningkat dari waktu ke waktu. Sementara itu dari sisi produksi masih berpotensi untuk terus ditingkatkan, baik melalui perluasan areal (ekstensifikasi), peningkatan intensitas tanam maupun peningkatan produktivitas melalui intensifikasi usaha tani (Hseu Ming-lii, 1990).

Strategi yang berpijak kepada keunggulan sumber daya seperti pemanfaatan lahan, tenaga kerja, modal dan lainnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi usaha tani guna mengurangi impor yang pada gilirannya dapat menciptakan keunggulan daya saing. Hal ini bisa terwujud apabila kebijakan yang sedang berlangsung dan yang akan datang mampu memberikan dukungan demi tumbuh dan berkembangnya suatu usaha tani dan agroindustri kedelai.

Aji (1997) menyatakan kebijakan merupakan campur tangan pemerintah yang mempengaruhi tingkat dan stabilitas harga input output sehingga dapat mempengaruhi biaya dan penerimaan usaha tani. Kebijakan

spesifik misalnya subsidi input dan fiskal serta nilai tukar mempengaruhi semua kegiatan sektor ekonomi. Dalam penerapan kebijakan harga merefleksikan dinamika pasar dan lebih diarahkan untuk merangsang produsen dalam meningkatkan produksi sehingga dapat mendorong terjadinya swasembada kedelai. Menurut Soetriono (2000) menyatakan bahwa keterlibatan pemerintah dalam membuat kebijakan harga baik input maupun output memegang peranan penting dalam mendukung sub-sistem hulu sampai hilir. Kebijakan pemerintah terhadap tingkat dan

stabilitas harga input output mempengaruhi biaya dan penerimaan usaha tani serta industri, sehingga dapat meningkatkan dan menurunkan produktivitas usaha tani. Kebijakan pemerintah yang berupa pemberian subsidi terhadap input produksi, perlindungan dan pengendalian harga akan mendukung kegiatan proses produksi yang meningkat. Kebijakan pemerintah dapat berdampak pada produsen, konsumen, pedagang perantara dan pengolah hasil pertanian. Dampak kebijakan pemerintah dapat dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap masing-masing pelaku ekonomi.

Tabel 1. Jumlah Populasi dan Sampel Petani Berdasarkan Luas Lahan

| No | Strata (Luas Lahan) | Populasi | | Jumlah Sampel |
|--------|--------------------------|----------|-----------------------------|---------------|
| | | (orang) | | (orang) |
| 1 | ≤ 0,90 | 140 | $\frac{140}{400} \times 40$ | 14 |
| 2 | 1,00-1,5 | 190 | $\frac{190}{400} \times 40$ | 19 |
| 3 | >1,5 | 70 | $\frac{160}{400} \times 40$ | 7 |
| Jumlah | | 400 | | 40 |

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Melakukan analisis keuntungan usaha tani kedelai di Desa Bataal Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.
2. Melakukan analisis daya saing dari sudut pandang keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.
3. Mengkaji dampak kebijakan pemerintah dalam usaha tani kedelai di Desa Bataal Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

Mengetahui daya saing komoditas kedelai di Desa Bataal Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep berkaitan dengan perubahan harga faktor-faktor produksi maupun kebijakan pemerintah.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bataal Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep dengan pertimbangan daerah tersebut merupakan salah satu daerah sentra produksi Kedelai dan merupakan

daerah pengairan semi teknis. Pada tahun 2009, luas areal tanaman kedelai di Kabupaten Sumenep adalah 2.066 ha dengan produksi 3510,13 ton tahun.

2.2. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dengan menggunakan metode *Proportionate Stratified Random Sampling*. Strata yang dipilih berdasarkan luas lahan yang diusahakan, yaitu meliputi: (a). ≤ 0,9 ha (sempit) , (b) 1,00 – 1,5 ha (sedang) dan (c) > 1,5 ha (luas). Sampel diambil secara acak dari setiap strata dengan ukuran sampel mengacu pada pendapat Soeratno dan Arsyad (2003) yang menyatakan bahwa pengambilan sampel adalah minimal 10% dari jumlah populasi yang ada. Formulasi ukuran sampel petani per strata digunakan rumus sebagai berikut (Singarimbun dan Effendi, 1986).

$$f_i = \frac{N_i}{N} \quad \text{dimana; } f_i = \text{fraksi sampel strata ke-i}$$

N_i = besarnya sub populasi strata ke-i, N = besarnya populasi

Berdasarkan teori tersebut peneliti mengambil sampel petani kedelai di Desa

Bataal Timur dengan sampel sebanyak 40 responden. Adapun besarnya populasi dan jumlah sampel pada masing-masing strata terdapat pada Tabel 1.

2.3. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, Rumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Komoditas kedelai menguntungkan bagi petani kedelai
2. Komoditas kedelai mempunyai daya saing baik dari sudut pandang

keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif

3. Kebijakan pemerintah berupa pemberian subsidi memberikan dampak positif dalam usaha tani kedelai
4. Perubahan kebijakan pemerintah jika terjadi kenaikan harga *input tradable* sebesar 10% dan 30% atau kenaikan harga pupuk urea sebesar 40 % akan menurunkan daya saing kedelai, dan atau kenaikan pajak cukai kedelai 20 % akan menurunkan daya saing kedelai.

Tabel 2. Policy Analysis Matrix

| Uraian | Penerimaan | Biaya | | Profit |
|---|------------|----------------|--------------------|--------|
| | | Input Tradable | Input Non Tradable | |
| Harga Privat | A | B | C | |
| Harga Sosial | E | F | G | |
| Dampak divergensi dan Kebijakan efisien | I | J | K | |

Sumber : Pearson *et al* (2003)

2.4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis *hipotesis pertama, kedua dan ketiga* yaitu daya saing dan dampak kebijakan pemerintah terhadap usaha tani kedelai digunakan alat analisis matrik kebijakan *Policy Analysis Matrix* (PAM) yang dikembangkan oleh Monke dan Pearson (1989). Model ini berupa suatu matrik yang disusun dengan memasukkan komponen-komponen utamanya penerimaan, biaya, dan profit (Soetrisno, 2006)

Hasil analisis PAM akan memberikan informasi tentang profitabilitas, daya saing suatu komoditas baik dari efisiensi ekonomik (keunggulan komparatif) maupun efisiensi finansial, dampak kebijakan pemerintah terhadap sistem komoditi tersebut. Tabel PAM, dapat disimak pada tabel matrik PAM sebagai berikut (Tabel 2).

Dari data Tabel 2. kemudian dapat dianalisis dengan berbagai indikator sebagai berikut :

- (1) Analisis keuntungan atau *Private Profitability* (PP)

$$D = A - B - C$$

A = Penerimaan privat

B = Biaya input *tradable* privat

C = Biaya input *non tradable* privat

- (2) Analisis keuntungan sosial Social Profitability (SP)

$$H = E - F - G$$

E = Penerimaan sosial

F = Biaya input *tradable* sosial

G = Biaya input *non tradable* sosial

- (3) Efisiensi Finansial (Keuntungan Kompetitif) atau *Private Cost Ratio*:

$$PCR = \frac{\text{Biaya Input non tradable Privat (C)}}{\text{Penerimaan privat (A) - Penerimaan input tradable privat (B)}}$$

- (4) Analisis efisiensi domestik (Keunggulan Komparatif) atau *Domestic Resource Cost Ratio*

$$DRC = \frac{\text{Biaya Input non tradable Sosial (G)}}{\text{Penerimaan sosial (E) - Penerimaan input tradable sosial (F)}}$$

- (5) *Output Transfer*

$$OT = \text{Penerimaan privat (A)} - \text{Penerimaan sosial (E)}$$

- (6) *Transfer Input*

$$IT = \text{Biaya input tradable privat (B)} - \text{Biaya input tradable sosial (F)}$$

- (7) *Transfer Faktor*

$$FT = \text{Biaya input non tradable privat (C)} - \text{Biaya input non tradable sosial (G)}$$

- (8) Transfer Bersih

$$\text{NPT} = \text{Keuntungan privat (D)} - \text{Keuntungan sosial (H)}$$

- (9) *Nominal Protection Coefficient on Tradable Output*

$$\text{NPCO} = \frac{\text{Penerimaan privat (A)}}{\text{Penerimaan sosial (E)}}$$

- (10) *Nominal Protection Coefficient on Tradable Input*

$$\text{NPCI} = \frac{\text{Biaya input tradable privat (B)}}{\text{Biaya input tradable sosial (F)}}$$

- (11) *Effective Protection Coefficient*

$$\text{EPC} = \frac{\text{Penerimaan privat (A)} - \text{Biaya input tradable privat (B)}}{\text{Penerimaan sosial (E)} - \text{Biaya input tradable sosial (F)}}$$

- (12) *Profitability Coefficient*

$$\text{PC} = \frac{\text{Keuntungan privat (D)}}{\text{Keuntungan sosial (H)}}$$

- (13) *Subsidy Ratio to Producer*

$$\text{SRP} = \frac{\text{Transfer bersih (L)}}{\text{Penerimaan sosial (E)}}$$

Untuk menjawab hipotesis pertama, digunakan nilai profitabilitas dengan rumus (Pearson *et al*, 2003):

Profitabilitas Privat (D) = A – B – C

Profitabilitas Sosial (H) = E – F – G

Kriteria Pengambilan Keputusan :

- Nilai Profitabilitas positif, maka usaha tani kedelai dikatakan efisien.
- Nilai Profitabilitas negatif, maka usaha tani kedelai dikatakan tidak efisien

Untuk menguji ada tidaknya keunggulan komparatif dari komoditas kedelai digunakan kriteria *Domestic Resources Cost* (DRC). Kriteria ini menyatakan nilai biaya sumberdaya dalam negeri yang diperlukan untuk meningkatkan hasil produksinya yang menghemat atau menghasilkan satu satuan devisa. Semakin kecil nilai koefisien DRC maka semakin efisien aktifitas ekonomi yang dinalisis, ditinjau dari efisiensi pemanfaatan sumberdaya domestik.

Kriteria Pengambilan Keputusan :

- Nilai DRC ≤ 1 , maka terdapat keunggulan komparatif usaha tani kedelai.
- Nilai DRC > 1 , maka tidak terdapat keunggulan komparatif usaha tani kedelai.

Untuk mengetahui ada tidaknya keunggulan kompetitif kedelai digunakan

kriteria *Private Cost Ratio* (PCR) yang menunjukkan daya saing petani pelaksana. Kriteria pengambilan keputusan :

- Nilai PCR ≤ 1 , maka terdapat keunggulan kompetitif pada usaha tani kedelai.
- Nilai PCR > 1 , maka tidak terdapat keunggulan kompetitif pada usaha tani kedelai.

Untuk melihat dampak kebijakan pemerintah dilihat dari indikator penting yaitu :

A. Kebijakan pemerintah terhadap output

Kebijakan ini dapat diterangkan dengan *Nominal Protection Coefficient on Output* (NPCO) dan *Output Transfer* (OT). Nilai NPCO menunjukkan dampak intensif dari kebijakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai output yang diukur dengan harga privat dan harga sosial. Nilai NPCO juga menunjukkan indikasi dari *transfer output*.

Kriteria Pengambilan Keputusan :

- Nilai NPCO ≤ 1 , tidak terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah.
- Nilai NPCO > 1 , terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah.

B. Kebijakan pemerintah terhadap input tradable

Kebijakan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar campur tangan pemerintah terhadap petani dan juga untuk melihat seberapa besar subsidi yang diberikan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam usaha tani kedelai Indikator yang digunakan *Nominal Protection Coefficient Input* (NPCI) dan *Transfer Input* (IT). Nilai NPCI merupakan ratio harga privat dari input yang diperdagangkan dengan harga sosialnya.

Kriteria Pengambilan Keputusan :

- Nilai NPCI ≤ 1 , terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah.
- Nilai NPCI > 1 , tidak terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah.

C. Kebijakan pemerintah terhadap input tradable dan Output

Untuk mengetahui perbedaan harga sosial dan harga privat yang diterima

petani, terutama untuk input produksi yang tidak diperdagangkan pada pasar internasional digunakan indikator *Transfer Faktor* (FT). Apabila nilai transfer faktor bernilai positif berarti biaya usaha tani untuk barang-barang domestik dibayar dengan harga yang lebih mahal daripada harga riil. Selain itu digunakan indikator *Net Policy Transfer* yang bila memberikan nilai negatif berarti kebijakan pemerintah tersebut belum memberi nilai tambah pada pengembangan usaha tani kedelai. Nilai transfer bersih dapat menunjukkan tingkat ketidakefisienan dalam sistem pertanian yang disebabkan adanya kebijakan pemerintah.

Untuk melihat kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan daya saing guna mendorong kegiatan sistem pertanian dapat digunakan *Effective Protection Coefficient* (EPC). EPC merupakan indikator yang memberikan nilai tambah terhadap komoditas kedelai.

Nilai *Profitability Coefficient* (PC) digunakan untuk mengukur pengaruh insentif dari seluruh kebijakan pemerintah. PC menunjukkan perbedaan tingkat keuntungan privat dan keuntungan sosial. *Ratio* ini menunjukkan pengaruh keseluruhan dari kebijakan yang menyebabkan keuntungan privat berbeda dengan keuntungan sosial.

Tabel 3. Tabel PAM Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep di Lahan Semi Teknis

*Policy Analysis Matrix: Kedelai (Rp/ha)**

| Usahatani | Tradables | | Faktor Domestik | | | | | Keuntungan | |
|--------------------|-----------|---------|-----------------|--------------|-----------------|--------|------------|------------|---------|
| | Output | Inputs | Lahan | Tenaga Kerja | Sarana Produksi | Modal | Penyusutan | | |
| <i>Private</i> | 12311129 | 572758 | 2366682 | 3471017 | 14485 | 486991 | 260184 | 6599360 | 5139011 |
| <i>Social</i> | 7938577 | 1049533 | 1893345 | 3037140 | 11588 | 349010 | 260184 | 5551268 | 1337776 |
| <i>Divergences</i> | 4372552 | -476775 | 473336 | 433877 | 2897 | 137981 | 0 | 1048091 | 3801235 |

* Sumber : data primer, diolah 2013

Nilai *Subsidy Ratio to Producers* (SRP) merupakan ratio antara tranfer bersih dengan penerimaan sosial (nilai output tanpa adanya gangguan kegagalan pasar atau kebijakan pemerintah). SRP memberikan indikasi tentang seberapa besar kebijakan pemerintah meningkatkan/mengurangi biaya produksi. Kriteria Pengambilan Keputusan :

- Nilai SRP dan NPT positif, terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah.
- Nilai SRP dan NPT negatif, tidak terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah.
- Nilai PC dan $EPC \leq 1$, tidak terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah.
- Nilai PC dan $EPC > 1$, terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah.

Untuk hipotesis keempat digunakan analisis sensitivitas yang bertujuan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan analisis proyek jika ada suatu kesalahan atau perubahan dalam dasar perhitungan biaya. Analisis yang digunakan sama dengan pengujian hipotesis kedua dan ketiga. Asumsi perubahan-perubahan yang terjadi pada usaha tani kedelai meliputi :

- kenaikan harga input *tradable* sebesar 10% dan 30 %.
- kenaikan harga pupuk urea atau tanpa subsidi sebesar 40 %
- kenaikan pajak cukai 20 %

III. HASIL PENELITIAN

3.1. Keuntungan Privat dan Sosial Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep

Hasil analisis menunjukkan bahwa usahatani kedelai di kabupaten Sumenep baik yang ditanam di lahan teknis dan di lahan semi teknis secara privat memiliki efisiensi usahatani. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis profitabilitas sistem harga privat yang bernilai positif. Dengan demikian usahatani kedelai baik di lahan teknis dan di lahan semi teknis menguntungkan dan mampu bersaing, serta layak untuk diusahakan. Hasil analisis profitabilitas sistem yang diterima petani pada usahatani kedelai dari kedua jenis lahan dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3. diketahui bahwa nilai keuntungan privat adalah Rp. 5.139.011 per ha untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep. Nilai tersebut

mengindikasikan bahwa, secara privat usahatani kedelai di lahan semi teknis menguntungkan dan layak untuk diusahakan.

Nilai profit usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis memiliki keuntungan. Hal ini disebabkan oleh kondisi lahan yang sangat mendukung, disamping lahan yang subur juga di ditunjang dengan air yang cukup. Usahatani kedelai di lahan semi teknis secara sosial menguntungkan yaitu sebesar Rp. 1.337.776 per ha. Usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep di semi teknis secara sosial menunjukkan nilai yang positif, ini dapat diartikan bahwa usahatani kedelai di kabupaten Sumenep semi teknis menguntungkan dan layak untuk diusahakan.

3.2. Daya Saing Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep di Lahan Semi Teknis

Daya saing suatu produk pada umumnya dapat diukur dengan dua cara yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep baik yang ditanam di lahan semi teknis dapat diketahui dari koefisien nilai PCR (*Privat Cost Ratio*) dan DRC (*Domestic Resource Ratio*). Hasil analisis keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dapat dilihat dengan menggunakan Matrik Analisis Kebijakan (PAM).

3.2.1. Keunggulan Komparatif Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep di Lahan Semi Teknis

Usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep di lahan semi teknis mempunyai keunggulan komparatif yang ditunjukkan dari nilai DRC kurang dari satu. Ini berarti secara ekonomi memproduksi kedelai di Kabupaten Sumenep di semi teknis dari segi penggunaan sumberdaya domestik adalah efisien dan menguntungkan. Hasil analisis keunggulan komparatif secara jelas dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai DRC Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep di Lahan Teknis dan di Lahan Semi Teknis*

| Jenis Usahatani | Nilai DRC |
|-------------------|-----------|
| Lahan Semi Teknis | 0,8058 |

* Sumber : data primer, diolah

Untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di semi teknis memiliki keunggulan komparatif. Ini dibuktikan dengan nilai DRC untuk semi teknis sebesar 0,8058 yang berarti untuk menghasilkan satu satuan tambah *output* hanya dibutuhkan biaya faktor domestik pada harga sosial sebesar 0,8058 untuk lahan semi teknis. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan satu satuan *output* pada semi teknis dapat dihemat 0,1942 satuan atau untuk menghasilkan satu satuan *output* dapat dihemat sebesar Rp 1.887,62 pada lahan semi teknis. Nilai tersebut diatas berdasarkan asumsi nilai tukar rupiah terhadap US\$ sebesar Rp. 9.720.

3.2.2. Keunggulan Kompetitif Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep di Lahan Semi Teknis

Hasil analisis menunjukkan bahwa usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep yang ditanam di lahan semi teknis memiliki keunggulan kompetitif. Hal ini dibuktikan dari nilai PCR kurang dari satu. Hasil analisis keunggulan kompetitif secara jelas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Nilai PCR Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep di Lahan Semi Teknis

| Jenis Usahatani | Nilai PCR |
|-------------------|-----------|
| Lahan Semi Teknis | 0,5622 |

* Sumber : data primer, diolah

Berdasarkan Tabel 5. dapat diketahui usahatani kedelai di kabupaten Sumenep yang ditanam usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis memiliki PCR 0,5622 yang berarti untuk menghasilkan satu-satuan nilai tambah *output* pada harga privat diperlukan

korbanan faktor sumberdaya domestik sebesar 0,5622 satuan atau untuk menghasilkan satu satuan *output* dapat dihemat 0,4378 atau sebesar Rp 4255,42. Nilai PCR diatas berdasarkan asumsi nilai tukar rupiah terhadap US\$ = Rp. 9.720.

Berdasarkan hasil analisa PCR, dapat diketahui bahwa usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep menghasilkan kedelai dengan kemampuan berkompetisi. Hal ini

terjadi karena usahatani kedelai di lahan semi teknis dinilai memiliki kesesuaian dengan lahan dan sumberdaya domestik. Adanya kesesuaian lahan dan sumberdaya domestik memungkinkan adanya efisiensi dalam menggunakan *input tradable*. Dengan demikian penggunaan faktor domestik lebih optimal dan pengeluaran untuk biaya *input* lebih rendah.

Tabel 6. Transfer *Input Tradable* Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep di Lahan Semi Teknis

| Usahatani | <i>Input Tradable*</i> | | | | | Total (Rp/Ha) | NPCI |
|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------|
| | Benih (Rp/Ha) | Urea (Rp/Ha) | SP-36 (Rp/Ha) | Dursban (Rp/Ha) | Buldog (Rp/Ha) | | |
| Lahan Semi Teknis | | | | | | | |
| Privat | 221.245,45 | 90.090,00 | 197.500,00 | 25.691,47 | 40.851,59 | 572.758,08 | |
| Sosial | 221.245,54 | 232.117,93 | 545.031,10 | 18.456,76 | 32.681,27 | 1.049.532,60 | 0.5457 |
| Divergensi | 0,00 | 278935.05 | -90416.19 | 5138.3 | 0 | -364212.94 | |

* Sumber : data primer

3.3. Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Usaha Tani Kedelai Di Kabupaten Sumenep di Lahan Semi Tehnis.

Dampak kebijakan pemerintah terhadap usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep dapat diketahui melalui tiga aspek, yaitu: (a) Kebijakan pemerintah terhadap *input tradable* dan faktor domestik, (b) Kebijakan pemerintah terhadap output, dan (c) Kebijakan pemerintah terhadap output dan input secara keseluruhan. Hasil kajian dari ketiga aspek tersebut dapat digunakan sebagai penentu ada tidaknya kebijakan pemerintah terhadap usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep di lahan semi teknis, serta mengetahui dampak kebijakan tersebut terhadap usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep yang diusahakan di lahan semi teknis.

3.3.1. Kebijakan Pemerintah Terhadap *Input Tradable* dan Faktor Domestik

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap *input tradable* berdampak positif terhadap usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep di lahan semi teknis. Pernyataan tersebut

dibuktikan dengan nilai NPCI di lokasi penanaman yang bernilai kurang dari satu. Ini berarti petani membeli *input* dengan harga yang lebih rendah dari harga sosial. Dapat dikatakan juga bahwa ada proteksi pemerintah terhadap *input* usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep. Hasil analisis NPCI dari penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 6.

Nilai NPCI usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebesar 0,5457 yang berarti bahwa petani membeli *input tradable* dengan harga 45 % lebih rendah dari harga input sosialnya. Nilai divergensi diketahui bahwa petani kedelai di kabupaten Sumenep harus membayar *input tradable* berupa urea, dan SP-36 lebih murah dari harga sosialnya, sedangkan untuk pestisida berupa *durband* dan *buldog* petani harus membayar lebih mahal dari harga sosialnya. Divergensi akibat lebih murah harga yang harus dibayarkan petani dengan harga yang sebenarnya mengindikasikan adanya subsidi yang diberikan pemerintah. Sebaliknya, bila harga yang harus dibayarkan petani lebih mahal dari harga yang sebenarnya mengindikasikan adanya pajak yang dibebankan pemerintah.

Subsidi pemerintah terhadap pupuk menyebabkan harga *input* yang harus

dibayar oleh petani lebih rendah dari harga sosial. Nilai divergensi, terlihat jelas adanya perbedaan yang mencolok antara harga pupuk yang harus dibayarkan petani dengan harga sosialnya. Adanya subsidi pupuk oleh

pemerintah khususnya pupuk urea dengan subsidi sebesar 45% di daerah penelitian telah membuat nilai yang dibayarkan petani untuk membeli *input* lebih kecil dari harga sosialnya.

Tabel 7. Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Faktor Domestik Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep di Lahan Semi Teknis

| Usahatani | Faktor Domestik | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|------------|---------|
| | Lahan | Tenaga Kerja | Sarana Produksi | Modal | Penyusutan | Total |
| Di Lahan Semi Teknis | | | | | | |
| Private | 2366682 | 3471017 | 14485 | 486991 | 260184 | 6599360 |
| Sosial | 1893345 | 3037140 | 11588 | 349010 | 260184 | 5551268 |
| <i>Divergences</i> | 473336 | 433877 | 2897 | 137981 | 0 | 1048091 |

* Sumber : data primer, diolah

Lebih mahal nya harga *input tradable* pestisida *durband* dan *buldog* disebabkan tidak adanya proteksi dari pemerintah berupa subsidi. Akan tetapi, penjualan *input* tersebut dibebani PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada jenis *input* pestisida. Pembebanan pajak dari pemerintah dikenakan atau ditambahkan secara langsung oleh distributor, sehingga harga *input* di tingkat petani lebih tinggi dari harga sosialnya.

Kebijakan pemerintah terhadap *input tradable* benih untuk usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep baik di lahan teknis dan di lahan semi teknis sama sekali tidak mempengaruhi harga di tingkat petani, hal ini dibuktikan dari nilai divergensi sebesar nol. Nilai tersebut menyatakan bahwa pemerintah tidak memberikan subsidi maupun pajak untuk benih kedelai, sehingga harga yang harus dibayarkan petani adalah sama dengan harga sosialnya. Hal ini disebabkan petani kedelai di Kabupaten Sumenep memperoleh bibit dari pedagang atau petani lain yang melakukan pembibitan. Oleh karena itu harga sosialnya sama dengan harga privatnya. Kebijakan pemerintah terhadap faktor domestik (*input non tradable*) ditunjukkan dari penggunaan tenaga kerja, sarana produksi, modal, lahan dan biaya penyusutan yang digunakan selama berusaha kedelai di Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada Tabel 6.

Faktor domestik tenaga kerja, modal, dan lahan yang dikeluarkan dalam

memproduksi kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis menunjukkan adanya divergensi. Pada faktor domestik tenaga kerja, nilai divergensi untuk lahan semi teknis secara secara privat adalah sebesar Rp. 3.471.017 sedangkan biaya sosial sebesar Rp. 3.037.140. Biayatenaga kerja privat lebih tinggi dari upah tenaga kerja yang seharusnya dikeluarkan selama melakukan produksi. Pengaruh ini disebabkan karena dalam melakukan kegiatan usahatani kedelai di kabupaten Sumenep, petani menggunakan tenaga tidak terampil. Upah yang diberikan kepada tenaga kerja tidak terampil tidak mencerminkan tingkat upah sosial yang sesungguhnya.

Sedangkan pada faktor domestik modal kerja yang dikeluarkan dalam memproduksi kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis nilai divergensinya menunjukkan nilai Rp. 473.336 lebih tinggi dari modal kerja yang seharusnya dikeluarkan selama kegiatan produksi. Pengaruh ini disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat suku bunga nominal yang dibayarkan pertahun sebesar 12%, sedangkan suku bunga sosial pertahun hanya sebesar 8,60%. Petani di daerah penelitian umumnya memanfaatkan jasa petani lain atau kas kelompok tani untuk mendapatkan modal sebagai biaya untuk usahatannya apabila modal pribadinya tidak mencukupi. Tingkat bunga pinjaman yang diterima petani lebih tinggi dari suku bunga sosial, yaitu sebesar 12%. Sedangkan

tingkat suku bunga sosial ditetapkan sebesar 8,60%. Lebih tingginya suku bunga privat disebabkan adanya pemasukan keuntungan bagi pihak pemberi modal, yaitu petani lain atau kelompok tani.

3.3.2. Kebijakan Pemerintah Terhadap Output

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap mekanisme pasar pada *output* kedelai di Kabupaten Sumenep, dapat diketahui dengan nilai NPCO (*Nominal Protection Coefficient Output*). Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai NPCO yang mempunyai nilai lebih dari satu, hal ini menyatakan bahwa terdapat kebijakan pemerintah yang memproteksi *output* atau harga privat *output* yang diterima petani lebih tinggi dari harga sosial.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kebijakan pemerintah yang memproteksi *output* untuk kedelai di lahan teknis dan semi teknis. Nilai harga privat yang diterima petani lebih tinggi dari harga sosial menunjukkan adanya kebijakan pemerintah yang berperan didalamnya. Hasil analisis dari penelitian secara jelas dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Transfer Output Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep di Lahan Semi Teknis

| Usahatani | Output (Rp/Ha) | NPCO |
|--------------------------|----------------|--------|
| Lahan Semi teknis | | |
| Privat | 12311129 | 1,5508 |
| Sosial | 7938577 | |
| Divergensi | 4372552 | |

* Sumber : data primer, diolah

Pada Tabel 8. menyatakan nilai koefisien NPCO untuk usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep di lahan semi teknis memiliki nilai NPCO 1,5508 artinya petani memperoleh harga 55,08 % lebih tinggi dari harga dunia.

Tingginya harga kedelai di kabupaten Sumenep di semi teknis yang dijual oleh petani jika dibandingkan dengan harga sosial kedelai di kabupaten Sumenep disebabkan karena kedelai di kabupaten

Sumenep yang dijual oleh petani kualitasnya lebih baik daripada kedelai yang diimpor. Hal ini disebabkan karena kedelai di Kabupaten Sumenep yang dijual oleh petani kebanyakan merupakan kedelai untuk kebutuhan domestik.

3.3.3. Kebijakan Pemerintah Terhadap Output dan Input secara Keseluruhan

Kebijakan *output* dan *input* secara keseluruhan dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu *Effective Protection Coefficient* (EPC), *Net Protection Transfer* (NPT), *Profitability Coefficient* (PC) dan *Subsidy Ratio to Producer* (SRP).

A. *Effective Protection Coefficient* (EPC)

Effective Protection Coefficient (EPC) atau analisis proteksi efektif digunakan untuk mengetahui pengaruh dari keseluruhan kebijakan pemerintah dan mekanisme pasar *input output*, apakah memberikan insentif atau disinsentif terhadap usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep baik di lahan teknis maupun semi teknis. Nilai EPC pada dasarnya bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah mampu melindungi atau menghambat produk domestik secara efektif. Bila nilai EPC lebih besar dari satu berarti dampak bersih kebijakan pemerintah dalam pembentukan harga dan mekanisme pasar komoditi telah memberikan insentif (perlindungan) terhadap petani kedelai untuk mengembangkan usahatannya. Sebaliknya, jika nilai EPC lebih kecil dari satu berarti, dampak bersih kebijakan pemerintah tersebut menimbulkan disinsentif terhadap pengembangan usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep. Nilai EPC juga dapat menjelaskan seberapa persen nilai tambah yang dinikmati dari nilai tambah sosialnya.

Berdasarkan analisis EPC diketahui bahwa dampak bersih kebijakan pemerintah dalam pembentukan harga dan mekanisme pasar komoditi telah memberikan insentif (perlindungan) kepada petani kedelai di Kabupaten Sumenep baik di lahan semi teknis. Hal ini dibuktikan dengan nilai EPC lebih besar dari satu, yang dapat diartikan pula bahwa nilai tambah yang dinikmati petani lebih tinggi dari nilai tambah

sosialnya. Sebaliknya pemerintah dalam pembentukan harga dan mekanisme pasar komoditi tidak memberikan insentif (perlindungan) kepada petani kedelai di Kabupaten Sumenep. Nilai EPC pada usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep ditunjukkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Nilai EPC Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep

| Usahatani | Output (Rp/Ha) | Input (Rp/Ha) | EPC |
|--------------------------|-------------------|------------------|--------|
| Lahan Semi teknis | | | |
| Privat | 12311129 | 572758 | 1,7039 |
| Sosial | 7938577 | 1049533 | |
| Divergensi | 4372552 | -476775 | |

* Sumber : data primer, diolah

Pada Tabel 9. menunjukkan bahwa nilai EPC untuk usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep di lahan semi teknis adalah sebesar 1,7039 yang berarti bahwa pemerintah memberikan insentif secara efektif kepada petani, karena terdapat nilai

Tabel 10. Nilai NPT Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep

| Usahatani | Output (Rp/Ha) | Input (Rp/Ha) | Faktor Domestik (Rp/Ha) | Keuntungan (Rp/Ha) |
|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Lahan Semi teknis | | | | |
| Privat | 12311129 | 572758 | 6599360 | 5139011 |
| Sosial | 7938577 | 1049533 | 5551268 | 1337776 |
| Divergensi | 4372552 | -476775 | 1048091 | 3801235 |

* Sumber : data primer, diolah

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep di lahan semi teknis mendapatkan dampak positif dari kebijakan pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan analisis NPT yang bernilai positif. Hasil analisis NPT secara jelas dapat dilihat pada Tabel 10.

Pada Tabel 10. diketahui nilai transfer bersih untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis adalah Rp 3.801.235. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan terhadap *input tradable* yang berupa kebijakan subsidi terhadap pupuk yang digunakan oleh petani kedelai di kabupaten Sumenep. Selain itu, harga *output* atau harga kedelai di kabupaten Sumenep di tingkat petani lebih

tambah yang dinikmati petani sebesar 70 % lebih tinggi dari nilai tambah sosialnya. Insentif yang diberikan pemerintah adalah berupa pemberian subsidi pupuk.

B. *Net Protection Transfer* (NPT)

Net Protection Transfer (NPT) merupakan nilai yang menggambarkan tambahan surplus produsen atau berkurangnya surplus produsen yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah, dihitung dari hasil pengurangan antara keuntungan bersih yang diterima produsen dengan keuntungan bersih sosial. Dengan kata lain, nilai transfer bersih *output* dapat dilihat dari nilai divergensi keuntungan privat dan sosial. Pengambilan keputusan didasarkan pada hasil analisis NPT positif yang menunjukkan adanya dampak positif dari kebijakan pemerintah. Sebaliknya jika NPT bernilai negatif berarti tidak terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah.

tinggi dari harga yang seharusnya diterima petani atau harga sosial.

C. *Profit Coefficient* (PC)

Setelah mengetahui surplus atau nilai divergensi keuntungan privat dan sosial, lebih lanjut dapat diketahui pula berapa perbandingan antara keuntungan privat dengan keuntungan sosial dengan menggunakan analisis *Profit Coefficient* (PC). Nilai PC adalah untuk mengetahui besarnya perbedaan tingkat keuntungan privat dan keuntungan sosial.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai PC untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis memiliki keuntungan privat yang lebih tinggi dari keuntungan sosialnya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai PC yang bernilai

lebih dari satu. Nilai PC yang bernilai lebih dari satu tersebut juga dapat menyatakan bahwa adanya kebijakan pemerintah menyebabkan keuntungan privat lebih

tinggi dari keuntungan sosialnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada hasil analisis dalam Tabel 11.

Tabel 11. Nilai PC Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep di Lahan Teknis dan di Lahan Semi Teknis

| Usahatani | Output (Rp/Ha) | Input (Rp/Ha) | Faktor Domestik (Rp/Ha) | Keuntungan (Rp/Ha) | PC |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------|
| Lahan semi teknis | | | | | |
| Privat | 12311129 | 572758 | 6599360 | 5139011 | 3,8415 |
| Sosial | 7938577 | 1049533 | 5551268 | 1337776 | |
| Divergensi | 4372552 | -476775 | 1048091 | 3801235 | |

* Sumber : data primer

Pada Tabel 11. diketahui nilai PC untuk usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep di lahan semi teknis adalah sebesar 3,8415 yang artinya petani memperoleh keuntungan privat lebih tinggi 284 % dari keuntungan sosialnya.

D. *Subsidy Ratio to Producer* (SRP)

Subsidy Ratio to Producer (SRP) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seluruh efek transfer. Rasio ini merupakan perbandingan antara transfer bersih dengan nilai *output* pada tingkat harga dunia, atau SRP menunjukkan sejauh mana pendapatan dari sistem meningkat atau menurun karena pengaruh transfer.

Tabel 12. Nilai SRP Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep di Lahan Semi Teknis

| Usahatani | Output (Rp/Ha) | Input (Rp/Ha) | Faktor Domestik (Rp/Ha) | Keuntungan (Rp/Ha) | SRP |
|---------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------|
| Lahan teknis | | | | | |
| Privat | 12311129 | 572758 | 6599360 | 5139011 | 0,4788 |
| Sosial | 7938577 | 1049533 | 5551268 | 1337776 | |
| Divergensi | 4372552 | -476775 | 1048091 | 3801235 | |

* Sumber : data primer, diolah

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa terdapat proteksi positif dari pemerintah terhadap usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis. Hal ini dibuktikan dari nilai SRP yang positif atau lebih besar dari nol. Nilai SRP yang positif tersebut juga menyatakan bahwa adanya proteksi dari pemerintah yang mampu menurunkan biaya produksi. Nilai SRP secara jelas dapat dilihat pada Tabel 12.

Pada Tabel 12. menunjukkan nilai SRP untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis memiliki nilai SRP sebesar 0,4788 yang berarti adanya kebijakan pemerintah dapat menurunkan biaya produksi sebesar 48 % untuk setiap satu kilogram produksi. Penurunan biaya produksi yaitu berupa

penurunan penggunaan biaya *input tradable*.

Berdasar nilai EPC, NPT, PC, dan SRP dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah memberikan dampak positif atau berpihak baik dari segi output dan *input tradable* terhadap petani kedelai di kabupaten Sumenep semi teknis. Artinya, pengaruh kebijakan pemerintah subsidi pupuk urea sebesar 48 % berdampak positif terhadap struktur biaya produksi sebab biaya yang diinvestasikan petani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis lebih rendah daripada nilai tambah yang diterima petani dari harga sosial yang seharusnya diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif

terhadap petani kedelai di Kabupaten Sumenep di semi teknis.

3.4. Dampak Perubahan Harga Faktor Produksi Terhadap Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep di Lahan Semi Teknis

Kedelai merupakan salah satu dari tanaman komersial yang pengusaannya mengandung risiko tinggi, baik bagi petani maupun perusahaan yang menyelenggarakan perusahaan mulai dari tingkat usahatani, *processing* dan

pemasaran hasil, termasuk ekspor impor. Petani, pengusaha dalam negeri maupun luar negeri dan pemerintah mendapatkan manfaat yang tinggi dari kedelai. Beberapa diantaranya berupa penyerapan tenaga kerja, pendapatan usahatani, pendapatan dari perusahaan kedelai, industri hulu dan hilir kedelai serta perdagangan baik lokal maupun internasional. Selain itu kedelai juga memiliki dampak perekonomian besar yang ditimbulkan dari tenaga kerja, pendapatan dari sektor pertanian serta dari perusahaan tahu dan tempe yang tinggi.

Tabel 13. Dampak Perubahan Kenaikan *Input Tradable* sebesar 10 % Terhadap Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep di Lahan Teknis dan di Lahan semi teknis

| Usahatani | PCR | DRC | NPCO | NPCI | EPC | NPT | PC | SRP |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| Lahan semi Teknis | | | | | | | | |
| Nilai Semula | 0.5622 | 0.8058 | 1.5508 | 0.5457 | 1.7039 | 3.801.235 | 3,8415 | 0.4788 |
| Kenaikan <i>Input Tradable</i> sebesar 10 % | 0.5650 | 0.8058 | 1.5508 | 0.6003 | 1,6959 | 3.743.959 | 3,7986 | 024716 |

* Sumber : data primer, diolah

Selain itu terdapat dampak positif dari adanya kebijakan pemerintah terhadap usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis. Artinya usahatani kedelai di kabupaten Sumenep sangat dipengaruhi perubahan harga input maupun output, dimana jika input dan output tersebut berubah sangat signifikan, maka ada kemungkinan usahatani kedelai di kabupaten Sumenep tersebut tidak layak lagi diusahakan.

Penelitian ini dilakukan skenario pemberlakuan kenaikan dan penurunan *input tradable* yang mempengaruhi produksi usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep. *Input tradable* yang diubah nilai terdiri dari harga bibit, pestisida, dan pupuk. Adanya perubahan faktor produksi akan memberikan perubahan dampak kebijakan pemerintah terhadap petani kedelai di kabupaten Sumenep baik di lahan semi teknis. Skenario perubahan harga faktor produksi yaitu berupa kenaikan harga *input tradable* sebesar 10% dan 30% serta kenaikan harga pupuk urea sebesar 40%. Selain itu dilakukan skenario kenaikan pajak impor kedelai sebesar 20%.

3.4.1. Kenaikan Harga *input tradable* sebesar 10 %

Skenario perubahan harga faktor produksi selanjutnya yaitu berupa kenaikan harga *input tradable* sebesar 10 %. Perubahan akibat kenaikan harga *input tradable* sebesar 10% secara jelas dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. terlihat bahwa dampak perubahan kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga *input tradable* sebesar 10%, tidak membawa perubahan terhadap nilai DRC dan NPCO. Hal ini disebabkan yang berubah hanya harga privat *input tradable*, sedangkan harga sosialnya tetap seperti semula. Adanya perubahan *input tradable* ini juga tidak mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan, selama faktor-faktor lain tetap.

Nilai PCR setelah perubahan kebijakan lebih besar daripada nilai sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan harga *input tradable* usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis tetap memiliki keunggulan kompetitif, yang dicerminkan dengan nilai PCR yang kurang dari satu. Adanya

kenaikan *input tradable* sebesar 10 % mengakibatkan harga privat *input tradable* lebih mahal daripada jika tidak terjadi kebijakan. Nilai PCR sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebesar 0,5622, setelah adanya kebijakan kenaikan *input tradable* 10% nilai PCR berubah menjadi 0,5650. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan *input tradable* 10% maka usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis tetap memiliki keunggulan kompetitif walaupun nilainya lebih rendah dari sebelumnya.

Kenaikan *input tradable* juga akan menyebabkan perubahan nilai NPCI. Pada Tabel 13. terlihat bahwa nilai NPCI untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis mengalami peningkatan. Nilai NPCI sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis secara berturut-turut sebesar 0,5457, setelah adanya kebijakan kenaikan *input tradable* 10% nilai NPCI berubah menjadi 0,6003. Ini menunjukkan bahwa dengan kenaikan *input tradable* 10% pemerintah masih tetap dapat memberikan proteksi input terhadap petani kedelai di kabupaten Sumenep.

Tabel 14. Dampak Perubahan Kenaikan *Input Tradable* sebesar 30 % Terhadap Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep di i Lahan Semi Teknis

| Usahatani | PCR | DRC | NPC | | EPC | NPT | PC | SRP |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|
| | | | O | NPCI | | | | |
| Lahan semi Teknis | | | | | | | | |
| Nilai Semula | 0.562 | 0.805 | 1.550 | 0.545 | 1.703 | 3.801.23 | 3,841 | 0.478 |
| Kenaikan <i>Input Tradable</i> sebesar 10 % | 2 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 8 |
| | 0.570 | 0.805 | 1.550 | 0.709 | 1,679 | | 3,713 | 0.457 |
| | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 | 3.629407 | 0 | 2 |

* Sumber : data primer

Dampak positif dari adanya kenaikan *input tradable* sebesar 10% ini juga dapat dilihat dari nilai EPC, PC, NPT, dan SRP. Nilai EPC sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebesar 1,7039 setelah adanya kebijakan kenaikan *input tradable* 10% nilai EPC berubah menjadi 1,6959. Hal ini berarti pemerintah dalam memberikan insentif secara efektif kepada petani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebagai dampak kebijakan *output* dan *input* menyebabkan nilai tambah yang diterima produsen lebih rendah dibandingkan dengan tanpa adanya kebijakan.

Nilai NPT sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis secara sebesar 3.801.235, setelah adanya kebijakan kenaikan *input tradable* 10% nilai NPT berubah menjadi 3.743.959. Kenaikan *input tradable* 10% ini berdampak penurunan keuntungan bagi petani kedelai di kabupaten Sumenep.

Penurunan ini disebabkan harga *input tradable* lebih mahal daripada sebelum terjadi kenaikan, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih tinggi daripada sebelumnya.

Nilai PC sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebesar 3,8415, setelah adanya kebijakan kenaikan *input tradable* 10 % nilai PC berubah menjadi 3,7986. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kenaikan *input tradable* 10 % dapat menurunkan keuntungan petani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis karena biaya yang mereka keluarkan selama proses produksi lebih tinggi daripada sebelumnya.

Nilai SRP sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebesar 0,4788, setelah adanya kebijakan kenaikan *input tradable* 10% nilai SRP berubah menjadi 0,2472. Hal ini menunjukkan bahwa nilai SRP yang diperoleh lebih rendah dari sebelum adanya kebijakan yang berarti bahwa adanya

kenaikan *input tradable* 10% dapat meningkatkan biaya produksi.

3.4.2. Kenaikan Harga *input tradable* sebesar 30 %

Skenario perubahan harga faktor produksi selanjutnya yaitu berupa kenaikan harga *input tradable* sebesar 30 %. Perubahan akibat kenaikan harga *input tradable* sebesar 30% secara jelas dapat dilihat pada Tabel 14.

Sebagaimana dengan kenaikan harga *input tradable* sebesar 10 % pada Tabel 14. terlihat bahwa dampak perubahan kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga *input tradable* sebesar 30%, tidak membawa perubahan terhadap nilai DRC dan NPCO. Kenaikan harga *input tradable* 30 % sangat berdampak pada perkembangan usahatani kedelai di kabupaten Sumenep.

Nilai PCR setelah perubahan kebijakan lebih besar daripada nilai sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan harga *input tradable* usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis tetap memiliki keunggulan kompetitif, yang dicerminkan dengan nilai PCR yang kurang dari satu. Adanya kenaikan *input tradable* sebesar 30 % mengakibatkan harga privat *input tradable* lebih mahal daripada jika tidak terjadi kebijakan. Nilai PCR sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebesar 0,5622, setelah adanya kebijakan kenaikan *input tradable* 10% nilai PCR berubah menjadi 0,5706. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan *input tradable* 30% maka usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis tetap memiliki keunggulan kompetitif walaupun nilainya lebih rendah dari sebelumnya.

Kenaikan *input tradable* juga akan menyebabkan perubahan nilai NPCI. Pada Tabel 14. terlihat bahwa nilai NPCI untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis mengalami peningkatan. Nilai NPCI sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis secara berturut-turut sebesar 0,5457, setelah adanya kebijakan kenaikan *input tradable* 30% nilai NPCI

berubah menjadi 0,7094. Ini menunjukkan bahwa dengan kenaikan *input tradable* 30% pemerintah masih tetap dapat memberikan proteksi input terhadap petani kedelai di kabupaten Sumenep.

Dampak positif dari adanya kenaikan *input tradable* sebesar 30% ini juga dapat dilihat dari nilai EPC, PC, NPT, dan SRP. Nilai EPC sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebesar 1,7039 setelah adanya kebijakan kenaikan *input tradable* 30% nilai EPC berubah menjadi 1,679. Hal ini berarti pemerintah dalam memberikan insentif secara efektif kepada petani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebagai dampak kebijakan *output* dan *input* menyebabkan nilai tambah yang diterima produsen lebih rendah dibandingkan dengan tanpa adanya kebijakan.

Nilai NPT sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis secara sebesar 3.801.235, setelah adanya kebijakan kenaikan *input tradable* 30% nilai NPT berubah menjadi 3.629.407. Kenaikan *input tradable* 30% ini berdampak penurunan keuntungan bagi petani kedelai di kabupaten Sumenep. Penurunan ini disebabkan harga *input tradable* lebih mahal daripada sebelum terjadi kenaikan, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih tinggi daripada sebelumnya.

Nilai PC sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebesar 3,8415, setelah adanya kebijakan kenaikan *input tradable* 30 % nilai PC berubah menjadi 3,713. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kenaikan *input tradable* 30 % dapat menurunkan keuntungan petani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis karena biaya yang mereka keluarkan selama proses produksi lebih tinggi daripada sebelumnya.

Nilai SRP sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebesar 0,4788, setelah adanya kebijakan kenaikan *input tradable* 30% nilai SRP berubah menjadi 0,4572. Hal ini menunjukkan bahwa nilai SRP yang diperoleh lebih rendah dari sebelum adanya kebijakan yang berarti bahwa adanya kenaikan *input tradable* 30% dapat meningkatkan biaya produksi.

3.4.3. Kenaikan Harga Pupuk Urea sebesar 40 %

Skenario perubahan harga selanjutnya adalah kenaikan harga pupuk urea sebesar 40 % untuk melihat pengaruh dampak kebijakan tidak adanya subsidi pupuk urea. Perubahan akibat kenaikan harga pupuk urea sebesar 40% secara jelas dapat dilihat pada Tabel 15.

Sebagaimana dengan perubahan harga *input tradable* pada Tabel 15. terlihat bahwa dampak perubahan kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga pupuk urea sebesar 40%, tidak membawa perubahan terhadap nilai DRC dan NPCO. Hal ini dikarenakan yang berubah hanya harga privat *input tradable*, sedangkan harga sosialnya tetap seperti semula.

Tabel 15. Dampak Perubahan Kenaikan Pupuk Urea sebesar 40 % Terhadap Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep di Lahan Semi Teknis

| Usahatani | PCR | DRC | NPCO | NPCI | EPC | NPT | PC | SRP |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| Lahan Semi Teknis | | | | | | | | |
| Nilai Semula | 0.5622 | 0.8058 | 1.5508 | 0.5457 | 1.7039 | 3.801.235 | 3,8415 | 0.4788 |
| Kenaikan pupuk urea sebesar 40 % | 0.5639 | 0.8058 | 1.5508 | 0.5801 | 1,6987 | 3.765199 | 3,8145 | 0,4743 |

* Sumber : data primer, diolah

Nilai PCR setelah perubahan kebijakan lebih besar daripada nilai sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan harga pupuk urea usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis tetap memiliki keunggulan kompetitif, yang dicerminkan dengan nilai PCR yang kurang dari satu. Adanya kenaikan pupuk urea sebesar 40 % mengakibatkan harga privat pupuk urea lebih mahal daripada jika tidak terjadi kebijakan. Nilai PCR sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebesar 0,5622, setelah adanya kebijakan kenaikan pupuk urea 40% nilai PCR berubah menjadi 0,5639. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan pupuk urea 40% maka usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis tetap memiliki keunggulan kompetitif walaupun nilainya lebih rendah dari sebelumnya.

Kenaikan pupuk urea juga akan menyebabkan perubahan nilai NPCI. Pada Tabel 15. terlihat bahwa nilai NPCI untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis mengalami peningkatan. Nilai NPCI sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebesar 0,5457, setelah adanya kebijakan kenaikan pupuk urea 40% nilai NPCI berubah menjadi 0,5801. Ini

menunjukkan bahwa dengan kenaikan pupuk urea 40% pemerintah masih tetap dapat memberikan proteksi input terhadap petani kedelai di kabupaten Sumenep.

Dampak positif dari adanya kenaikan pupuk urea sebesar 40% ini juga dapat dilihat dari nilai EPC, PC, NPT, dan SRP. Nilai EPC sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebesar 1,7039 setelah adanya kebijakan kenaikan pupuk urea 40% nilai EPC berubah menjadi 1,6987. Hal ini berarti pemerintah dalam memberikan insentif secara efektif kepada petani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebagai dampak kebijakan *output* dan *input* menyebabkan nilai tambah yang diterima produsen lebih rendah dibandingkan dengan tanpa adanya kebijakan.

Nilai NPT sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis secara sebesar 3.801.235, setelah adanya kebijakan kenaikan pupuk urea 40% nilai NPT berubah menjadi 3.765199. Kenaikan pupuk urea 40% ini berdampak penurunan keuntungan bagi petani kedelai di kabupaten Sumenep. Penurunan ini disebabkan harga *input tradable* lebih mahal daripada sebelum terjadi kenaikan, sehingga biaya yang

dikeluarkan lebih tinggi daripada sebelumnya.

Nilai PC sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebesar 3,8415, setelah adanya kebijakan kenaikan pupuk urea 40 % nilai PC berubah menjadi 3,8145. Hal ini

dapat menunjukkan bahwa kenaikan pupuk urea 40 % dapat menurunkan keuntungan petani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis karena biaya yang mereka keluarkan selama proses produksi lebih tinggi daripada sebelumnya.

Tabel 16. Dampak Perubahan Kenaikan Pajak Impor sebesar 20 % Terhadap Usahatani Kedelai di Kabupaten Sumenep di Lahan Semi Teknis

| Usahatani | PCR | DRC | NPCO | NPCI | EPC | NPT | PC | SRP |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| Lahan Semi Teknis | | | | | | | | |
| Nilai Semula | 0.5622 | 0.8058 | 1.5508 | 0.5457 | 1.7039 | 3.801.235 | 3,8415 | 0.4788 |
| Kenaikan Pajak Cukai sebesar 20 % | 0.5622 | 0.6549 | 1.2923 | 0.5457 | 1,3848 | 2.213.519 | 1,7566 | 0,2324 |

* Sumber : data primer, diolah

Nilai SRP sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebesar 0,4788, setelah adanya kebijakan kenaikan pupuk urea 40% nilai SRP berubah menjadi 0,4743. Hal ini menunjukkan bahwa nilai SRP yang diperoleh lebih rendah dari sebelum adanya kebijakan yang berarti bahwa adanya kenaikan pupuk urea 40% dapat meningkatkan biaya produksi.

3.4.4. Kenaikan Pajak Impor Kedelai Sebesar 20 %

Skenario perubahan harga selanjutnya adalah kenaikan pajak impor kedelai sebesar 20 %. Perubahan akibat kenaikan pajak impor kedelai sebesar 20% secara jelas dapat dilihat pada Tabel 16.

Pada Tabel 16. terlihat bahwa dampak perubahan kebijakan pemerintah yaitu dengan menaikkan pajak impor kedelai sebesar 20 %, tidak membawa perubahan terhadap nilai PCR dan NPCI. Hal ini dikarenakan yang berubah harga *output* secara sosial.

Nilai PCR setelah perubahan kebijakan sama dengan nilai sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pajak impor kedelai usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep pada lahan semi teknis tetap memiliki keunggulan kompetitif, yang dicerminkan dengan nilai PCR yang kurang dari satu yaitu sebesar 0,5622.

Adanya kenaikan pajak impor kedelai sebesar 20 % mengakibatkan harga output lebih mahal daripada jika tidak terjadi kenaikan. Nilai DRC sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebesar 0,8058 setelah adanya kebijakan kenaikan pajak impor kedelai sebesar 20% nilai DRC berubah menjadi 0,6549. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan pajak impor kedelai sebesar 20 % maka usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis lebih memiliki keunggulan komparatif dari sebelumnya.

Kenaikan pajak impor kedelai juga akan menyebabkan perubahan nilai NPCO. Pada Tabel 16. terlihat bahwa nilai NPCO untuk usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep di lahan semi teknis mengalami peningkatan. Nilai NPCO sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di Kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebesar 1,5508, setelah adanya kebijakan kenaikan pajak impor kedelai sebesar 20% nilai NPCO berubah menjadi 1,2923. Ini menunjukkan bahwa dengan kenaikan pajak impor kedelai sebesar 20% pemerintah kurang memberikan proteksi output terhadap petani kedelai di kabupaten Sumenep di di lahan semi teknis.

Dampak negatif dari adanya kenaikan pajak impor kedelai sebesar 20% ini juga dapat dilihat dari nilai EPC, PC, NPT, dan SRP. Nilai EPC sebelum kebijakan untuk

usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebesar 1,7039, setelah adanya kebijakan kenaikan pajak impor kedelai sebesar 20 % nilai EPC berubah menjadi 1,3848. Hal ini berarti pemerintah dalam memberikan insentif kurang efektif kepada petani kedelai di kabupaten Sumenep sebagai dampak kebijakan *output* dan *input* yang diberlakukan pemerintah menyebabkan nilai tambah yang diterima produsen lebih rendah dibandingkan dengan tanpa adanya kebijakan.

Nilai PC sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebesar 3,8415 dan setelah adanya kebijakan kenaikan pajak impor kedelai sebesar 20 % nilai PC berubah menjadi 1,7566. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kenaikan pajak impor kedelai sebesar 20% dapat mengakibatkan keuntungan yang petani kedelai di kabupaten Sumenep menjadi lebih rendah dari sebelum adanya kebijakan

Nilai NPT sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebesar 3.801.235, setelah adanya kebijakan kenaikan pajak impor kedelai sebesar 20 % nilai NPT berubah menjadi 2.213.519 Kenaikan pajak impor kedelai sebesar 20 % ini berdampak penurunan keuntungan bagi petani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis. Peningkatan ini disebabkan harga *output* yang diterima petani menjadi lebih rendah daripada sebelum terjadi kenaikan.

Nilai SRP sebelum kebijakan untuk usahatani kedelai di kabupaten Sumenep di lahan semi teknis sebesar 0,4788, setelah adanya kebijakan kenaikan pajak impor kedelai sebesar 20 % nilai SRP berubah menjadi 0,2324. Hal ini menunjukkan bahwa nilai SRP yang diperoleh lebih rendah dari sebelum adanya kebijakan. Ini berarti bahwa adanya pajak impor kedelai sebesar 20% dapat menurunkan pendapatan petani.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan secara spesifik dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Usahatani kedelai yang ditanam di lahan semi teknis secara privat memiliki

efisiensi usahatani. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis keuntungan sistem harga privat yang bernilai positif. Begitu juga secara sosial menunjukkan nilai yang positif, ini dapat diartikan bahwa usahatani kedelai yang ditanam di lahan semi teknis memiliki efisiensi, menguntungkan dan mampu bersaing, serta layak untuk diusahakan.

2. Usahatani kedelai yang ditanam di lahan semi teknis memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
3. Kebijakan pemerintah memberikan dampak positif atau berpihak baik dari segi *output* dan *input tradable* terhadap petani kedelai.
4. Perubahan kebijakan pemerintah jika terjadi kenaikan harga *input tradable* sebesar 10% dan 30%, serta kenaikan harga pupuk urea sebesar 40 % dan kenaikan pajak impor kedelai sebesar 20 %, dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan:
 - a. Perubahan kebijakan dengan menaikkan harga *input tradable* 10% dan 30% mengakibatkan penurunan keunggulan kompetitif dari usahatani kedelai.
 - b. Perubahan kebijakan dengan menaikkan harga pupuk urea 40% mengakibatkan penurunan keunggulan kompetitif dari usahatani kedelai
 - c. Perubahan kebijakan dengan menaikkan pajak impor kedelai 20% mengakibatkan penurunan keunggulan komparatif dari usahatani kedelai

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, J.M.M.1997. *Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Nilai Tambah Agroindustri Kedelai di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember. Jurnal Laporan Penelitian*. Jember : Fakultas Pertanian Universitas Jember.
- Hseu Ming-lii.1990. *Budidaya Kedelai Secara Insentif*. Surabaya: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Jatim.
- Monke, E.A. dan Pearson, S.R. 1989. *The Policy Analysis Matrix For Agricultural Development*. London:

- Cornet Unersitas Press.
- Soetriono.2000. *Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap komoditas Tebu Guna Mendukung Agribisnis*, Jurnal Agribisnis, Volume IV No. 1, Hal 56-61. Jember: Universitas Jember.
- _____.2006. *Daya Saing Pertanian Dalam Tinjauan Analisis*. Jawa Timur: Banyumedia Publishing, IKAPI.
- Soeratno dan Arsyad, L. 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan UPP YKPN